

## **Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Meningkatkan kualitas Pendidikan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya**

**Syahrul Ramadhan**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[syahrul.18087@mhs.unesa.ac.id](mailto:syahrul.18087@mhs.unesa.ac.id)

**Suci Megawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[sucimegawati@unesa.ac.id](mailto:sucimegawati@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan kampus belajar merdeka, yang dirancang untuk membantu mahasiswa unggul dalam bidang studi pilihan mereka dengan memungkinkan mereka untuk fokus pada penguasaan ilmu yang relevan. Topik penelitian ini adalah implementasi Kebijakan merdeka belajar di Kampus Merdeka Universitas Negeri Surabaya, di mana banyak mahasiswa yang datang untuk menerima hambatan yang menghalangi mereka untuk menerima pendidikan berkualitas tinggi di bawah kebijakan (MBKM). bagaimana Universitas Negeri Surabaya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswanya dengan memberlakukan kebijakan “MBKM” di banyak kampusnya, dan tantangan apa yang dihadapi kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Tata cara pengumpulan informasi melalui percakapan, observasi, dan pencatatan. Metode analisis data meliputi summarization, analysis, dan inference (Milles dan Huberman). Menurut kriteria George E. III, penelitian dipusatkan pada empat faktor berikut: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan bahwa, meskipun ada penolakan mahasiswa, penerapan Kebijakan (MBKM) sebagian besar berhasil. Tantangan yang dihadapi pihak Universitas untuk meningkatkan kualitas Pendidikan mahasiswanya dalam mengatur Standar Operasional Prosedur yang bisa berjalan dengan efektif untuk mahasiswa, Konsisten dalam komunikasi kepada Mahasiswa selain itu tantangan yang dialami oleh mahasiswa yaitu uang saku yang diberikan untuk yang ikut program MBKM masih terlambat. Saran penelitian ini adalah 1. Satuan Tugas MBKM meningkatkan konsisten Komunikasi, 2. Rektorat dari segi Sumber daya keuangan jangan sampai terlambat memberikan uang saku 3. Memperbaiki Manajemen atau Standar Operasional Prosedur untuk menunjang MBKM Di Universitas.

**Kata Kunci:** Kebijakan, MBKM, Kualitas Pendidikan

### **Abstract**

One such policy is the independent learning campus policy, which is designed to help students excel in their chosen field of study by enabling them to focus on mastering relevant knowledge. The topic of this research is the implementation of the Independent Learning Policy at the Merdeka Campus of the State University of Surabaya, where many students come to accept the obstacles that prevent them from receiving a high-quality education under the policy (MBKM). how the State University of Surabaya seeks to improve the quality of education for its students by implementing the “MBKM” policy on many of its campuses, and what challenges the policy faces. Researchers used qualitative descriptive methods in their research. Procedures for collecting information through conversation, observation, and recording. Data analysis methods include summarization, analysis, and inference (Milles and Huberman). According to the criteria of George E. III, research is focused on the following four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Research at the State University of Surabaya revealed that, despite student resistance, the implementation of the Policy (MBKM) was largely successful. The challenge faced by the University is to improve the quality of its students' education by setting Standard Operating Procedures that can run effectively for students, Consistent communication to students besides the challenges experienced by students, namely the pocket money given to those who join the MBKM program is still late. Suggestions for this research are 1. The MBKM Task Force improves consistent communication, 2. The Rectorate in terms of financial resources should not be late in giving pocket money 3. Improve Management or Standard Operating Procedures to support MBKM at the University.

**Keywords:** Policy, MBKM, Education Quality

## PENDAHULUAN

Tingkat pendidikan di suatu negara merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan masa depan. Dalam hal pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, serta pendidikan kehidupan bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi memegang peranan penting (Prabawati, dkk. 2021). Pendidikan juga merupakan proses yang bertujuan untuk membentuk siswa sehingga mereka dapat secara efektif menyesuaikan diri dengan keadaan baru dan membuat penyesuaian pribadi yang diperlukan untuk berkembang di lingkungan sosial mereka.

Negara Indonesia mempunyai tugas yang besar dalam membangun negara melalui pendidikan yang tersedia bagi semua golongan sehingga dapat terbentuk penduduk yang berpendidikan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 negara. Kewajiban negara terhadap warga negaranya dalam bidang pendidikan memiliki dasar yang mendasar karena negara dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005, dan ditegaskan kembali dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 026/PUU-III/2005. Ini adalah bukti kenegaraan bahwa mandat ini sedang dilakukan.

Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A.,M.B.A, yang mengepalai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengusulkan strategi yang disebut "Merdeka Belajar" (atau "kampus merdeka") dalam menanggapi masalah yang dihadapi pendidikan nasional. Ide ini pada dasarnya memberikan kemandirian mahasiswa saat mereka mengejar gelar mereka. Konsep Pendidikan ini merupakan salah satu inovasi dibidang Pendidikan terutama dalam hal pembelajaran agar mahasiswa mendapatkan kualitas pembelajaran yang berkualitas dan Indonesia mampu mendapatkan peningkatan Sumberdaya Manusia.

Pelaksanaan Kebijakan MBKM Di Perguruan Tinggi Negeri sebenarnya sudah dilaksanakan Tahun 2020 berdasarkan pada kebijakan merdeka-belajar ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomer 3,4,5,6,7 tahun 2020 yang dimana pada permendikbud itu diatur mengenai standarisasi Pendidikan ,akreditasi program studi,penerimaan mahasiswa baru pada PTN Hingga pada izin pendirian,perubahan,pembubaran perguruan tinggi. Menerapkan kampus yang mandiri belajar adalah langkah penting untuk menempatkan siswa di pusat proses pendidikan, yang sangat penting dalam

kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam hal menumbuhkan orisinalitas, kreativitas, kemampuan, kepribadian, dan persyaratan individu, kebijakan lingkungan belajar mandiri kampus menghadirkan jalan pertumbuhan yang menjanjikan. Pertukaran mahasiswa, pengajaran di kampus, magang, dan studi independen bersertifikat adalah tiga inisiatif utama kampus independen belajar mandiri yang berkontribusi pada realisasinya.

Studi Endang Kesulitaniyana et al (2021). menguatkan temuan ini, menunjukkan bahwa MBKM adalah alat yang sangat baik untuk mempersiapkan siswa untuk kehidupan setelah kuliah. Untuk memulai, kita harus mengatasi kebutuhan mendesak untuk membekali lulusan saat ini dengan keterampilan keras dan lunak yang mereka perlukan dalam karir mereka. Tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi adalah masih terkendala dalam manajemen dalam hal penyesuaian Mata Kuliah yang masih disesuaikan dengan kurikulum MBKM dan masih banyaknya Tenaga pendidik dan sarana prasana yang perlu ditingkatkan untuk menunjang kebijakan MBKM. Dari adanya kekurangan dan kelebihan dapat dijadikan Perguruan Tinggi sebagai pedoman dalam melaksanakan MBKM yang dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk menetapkan strategi Pelaksanaan.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah mengadopsi kebijakan MBKM sejak awal tahun ajaran 2020, sehingga memudahkan mahasiswa untuk menempuh mata kuliah non gelar hingga tiga semester. Pelaksanaan MBKM ditahun 2020 sebelum covid 19 berjalan dengan sebagaimana semestinya berdasarkan panduan MBKM yang telah dirilis oleh kemendikbud. Pada maret 2020 covid 19 menyerang Indonesia dan membuat sistem Pendidikan terutama MBKM di Universitas Negeri Surabaya mengalami berbagai kendala dan menghambat Universitas Negeri Surabaya lewat MBKM meningkatkan kualitas Pendidikan mahasiswa.

Universitas Negeri Surabaya berdedikasi pada filosofinya dalam menyediakan pendidikan bebas kampus, dan telah menerapkan kebijakan ini melalui sejumlah inisiatif: Fakultas Teknik sudah mengirim mahasiswa ke jepang untuk mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa (Permata) yang diwadahi oleh belmawa, Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam terapkan outcome based learning , Fakultas Ekonomi dan bisnis mengidentifikasi mata kuliah untuk kegiatan Outclass (magang,proyek kewirausahaan ), Fakultas Pendidikan telah melakukan persiapan yang matang, seperti mengatur pertukaran, untuk penerapan kebijakan pembelajaran

kampus mandiri, memungkinkan Fakultas Bahasa dan Seni memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan metode pembelajaran secara mandiri, memungkinkan mahasiswa untuk melakukan lintas-kegiatan disiplin untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sesuai minat dan bakat siswa. sarjana untuk

Universitas Negeri Surabaya menyadari potensi kebijakan kampus belajar mandiri untuk berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswanya dengan memasukkan realitas dan dinamika lapangan seperti keterampilan, masalah, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, bimbingan kinerja, target, dan pencapaian. Ada beberapa faktor, seperti program studi/tantangan fakultas, yang perlu diubah agar kebijakan MBKM dapat diterapkan sepenuhnya dalam sistem pendidikan. Mata kuliah dari kurikulum MBKM yang diadopsi sedang diadaptasi. Selanjutnya mahasiswa, masih banyak dosen di Universitas Negeri Surabaya yang membutuhkan pelatihan agar dapat beradaptasi dengan kebijakan MBKM.

Jika benar, ini bertentangan dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan. Tetapi kebijakan publik adalah seperangkat hukum yang dibuat untuk kepentingan semua warga negara. Kebijakan publik mengacu pada seperangkat aturan yang ditetapkan untuk kepentingan semua orang. Dimana kebijakan publik mengacu pada tindakan pemerintah dan niat dalam menentukan tindakan serta memilih tujuan dan alternatif dalam pembuatan kebijakan. Menurut Dye (1978) bahwasanya menjelaskan kebijakan publik merupakan *“Whatever governments choose to do or not to do”*. Yang mungkin terlihat menyiratkan bahwa kebijakan pemerintah sepenuhnya bersifat diskresi.

Kebijakan publik, menurut penggunaan istilah Dye, adalah upaya untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, mengapa melakukannya, dan apa yang menyebabkannya berperilaku seperti itu. Akibatnya, tidak selalu mungkin untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan proses dan peraturan yang ditetapkan oleh pusat. Karena hal tersebut dikembalikan lagi kepada wilayah maupun instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Yang kemudian dari keputusan tersebut dapat diimplementasikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh organisasi pendidikan dimana dalam menerapkan program kebijakan pendidikan yang telah dibuat atau ditetapkan oleh kementerian, dinas pendidikan, maupun organisasi lain yang berkaitan ( Baidowi, 2020). Dalam mengkaji implementasi kebijakan perlu memperhatikan beberapa indikator-indikator dalam pelaksanaan kebijakan. Pradana (2016) mengutip George III yang mengatakan bahwa

empat aspek atau variabel komunikasi, sumber daya, perilaku (disposisi), dan struktur birokrasi menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan.

1.Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan benar, mengurangi timbulnya distorsi implementasi, apabila terjalin komunikasi yang baik antara pelaksana program dan tujuan program atau antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

2.Sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan organisasi diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

3.Tingkah laku (Disposisi), dalam indikator ini ditekankan pada bagaimana karakteristik implementor dalam mengimplementasikan kebijakan/program dengan jujur, komitmen, serta demokratis.

4.Struktur Birokrasi, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ini tentu juga dapat dipengaruhi dari struktur birokrasi dalam suatu organisasi/ instansi. Yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme atau karakteristik, norma maupun pola pelaksana organisasi.

Pelaksanaan Pendidikan antara Kebijakan MBKM dengan kurikulum sebelumnya tentunya sangat berbeda dimana muatan MBKM lebih membebaskan Mahasiswanya untuk belajar diluar prodi dan mengikuti berbagai program dari Universitas maupun Kementerian . Proses belajar saat Sebelum Kebijakan MBKM Masih mewajibkan mahasiswa untuk terus belajar dalam prodi selama 8 semester . Namun, disituasi saat ini pelaksanaan pembelajaran bisa diluar prodi dan ikut kegiatan kementerian seperti Kampus mengajar . Di Universitas Negeri Surabaya mempunyai 8 fakultas kelas jurusan/prodi berjumlah 40 dengan setiap kelas terdiri dari 30-40 Mahasiswa jumlah yang sangat banyak untuk Universitas Sehingga dalam hal ini diperlukan perhatian lebih dalam penerapan Kebijakan MBKM untuk Peningkatan kualitas Pendidikan Mahasiswa bisa diterapkan 100%

Berdasarkan latar belakang tersebut, topik “Penerapan kebijakan pembelajaran mandiri di kampus mandiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya” telah menarik perhatian kalangan akademisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi implementasi MBKM di Universitas Negeri Surabaya saat ini dan sejauh mana infrastruktur universitas disiapkan untuk membantu peningkatan hasil belajar mahasiswa. Studi ini menerapkan teori 4-faktor George E. III tentang implementasi kebijakan (yaitu, arus informasi, ketersediaan sumber daya, ciri-ciri kepribadian, dan kerangka kelembagaan) pada topik penelitian yang ada. keberhasilan program dalam pendidikan perlu adanya SOP yang jelas, program perlu dikomunikasikan dengan baik, perlu sumber daya, dan disposisi atau sikap pelaksana

(Tjihjik,2019). Dalam pemahaman peneliti ini menjadi penting terlebih Kebijakan MBKM dalam peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa.

## METODE PENELITIAN

Untuk lebih memahami dampak Kebijakan Belajar Mandiri di Kampus Mandiri Universitas Negeri Surabaya terhadap kualitas pendidikan yang diperoleh mahasiswanya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini gabungan dari Studi lapangan (*field study*) dan studi Pustaka (*literature review*) dalam Darmalaksana (2020: 3). Yang pelaksanaannya dilakukan dari bulan Februari sampai Juni 2022. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Surabaya, beberapa Fakultas, beberapa jurusan atau prodi.

Pengambilan sampel bertujuan digunakan, dan sumber primer dan sekunder dikonsultasikan untuk penelitian ini. Adapun sumber data diperoleh dalam penelitian berupa Wawancara dilakukan dengan ketua satuan Tugas MBKM Universitas Negeri Surabaya, 10 Mahasiswa/i Universitas Negeri Surabaya dari berbagai fakultas Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan dengan melihat ke mitra terkait MBKM UNESA

Penerapan kebijakan belajar Merdeka Universitas Negeri Surabaya di kampus tersendiri difoto untuk dokumentasi. Informasi ini akan dianalisis dan dievaluasi untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditarik kesimpulan. Gagasan yang dikemukakan oleh George E. III tersebut menjadi indikator atau acuan dalam fokus area penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Keempat hal tersebut adalah: komunikasi, sumber daya, perilaku (sikap), dan struktur organisasi.

Peneliti menggunakan keempat indikator di atas untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menggambarkan sejauh mana Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Bahasa dan Seni mengikuti ketentuan pembelajaran mandiri universitas- kebijakan kampus.

Analisis data teknis penelitian ini didasarkan pada karya Miles dan Huberman, yang mengusulkan pendekatan tiga cabang untuk memahami data: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Merdeka belajar kampus merdeka

Otonomi mahasiswa di kampus merupakan respon terhadap tuntutan Revolusi Industri Keempat dan Kelima, di mana pekerja saat ini perlu terus-menerus mempelajari keterampilan baru, berpikir di luar kotak, dan berkolaborasi secara efektif (Purike, 2021). (Siregar, Sahirah dan Harahap, 2020) Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, fokusnya adalah pada pelajar

individu, dengan tujuan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan dapat dipekerjakan setelah lulus (Baharuddin, 2021) (Muslim, 2020).

Perguruan Tinggi Merdeka Salah satu kebijakan Nadiem Anwar Makarim adalah "Merdeka". Dia adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebutuhan ini dimaksudkan untuk dipenuhi oleh Kebijakan Belajar Mandiri - Kampus Merdeka. Tujuan Kampus Merdeka, model pendidikan tinggi yang mandiri dan adaptif, adalah untuk menumbuhkan lingkungan pendidikan yang kreatif, bebas, dan berpusat pada siswa. Kebutuhan ini dimaksudkan untuk dipenuhi oleh Kebijakan Belajar Mandiri - Kampus Merdeka. Tujuan Kampus Merdeka, model pendidikan tinggi yang mandiri dan adaptif, adalah untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang kreatif, bebas, dan selaras dengan kebutuhan individu mahasiswa.

Kebijakan Belajar Mandiri di Kampus Merdeka menjamin kesempatan mahasiswa untuk menempuh hingga tiga semester mata kuliah yang tidak termasuk dalam kurikulum resmi. Untuk meningkatkan standar pendidikan dan lulusan perguruan tinggi, program tersebut diwajibkan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Berikut teks undang-undang yang mendukung otonomi kampus tempat mahasiswa menuntut ilmu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan selama tiga semester di luar jurusannya, meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan beradaptasi mereka saat dunia memasuki revolusi industri keempat. 5.0. mendidik siswa untuk menjadi pemimpin yang kompeten dan bermoral tinggi di dunia. Potensi siswa dapat dipupuk sesuai dengan minat dan kekuatannya melalui program experiential learning yang menyediakan rencana pembelajaran individual.

Selama periode tiga semester, siswa memiliki pilihan untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler berikut: Program meliputi: Magang, Penelitian, Penelitian Kemanusiaan, Kegiatan Kewirausahaan, Studi Mandiri, dan Kuliah Kerja Nyata Tematik. Baik itu soft skill atau

hard talent mereka, siswa diharapkan untuk mendapatkan manfaat dari tiga komponen utama Program Belajar Mandiri. Kampus independen Merdeka Learning menawarkan tiga program utama:

1. Mengajar di kampus, juga dikenal sebagai "kampus mengajar" atau "Bantuan Mengajar," adalah komponen dari program kampus mandiri yang mempekerjakan siswa sebagai guru di sekolah dasar 4T dengan tujuan memberi mereka pengalaman di luar kelas yang akan membantu mereka tumbuh dan belajar (daerah tertinggal, terdepan, terluar, transmigrasi)
2. Magang bersertifikat atau studi mandiri adalah program yang ditawarkan oleh lembaga di luar kampus, biasanya terdiri dari magang yang terstruktur secara intensif atau intensif untuk memaksimalkan potensi belajar siswa. Studi mandiri, di sisi lain, adalah bentuk pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik siswa untuk membantu mereka memenuhi hambatan yang pasti akan hadir dalam hubungan dan industri mereka di masa depan.
3. Pertukaran Pelajar Independen adalah program selama satu semester di mana siswa dari kelompok regional yang berbeda melakukan perjalanan satu sama lain untuk belajar tentang budaya yang berbeda dan bertukar hingga +/- 20 kredit kursus senilai.
4. Mahasiswa yang berminat melakukan penelitian orisinal dapat berpartisipasi dalam inisiatif kebijakan di bawah payung kebijakan pembelajaran mandiri kampus. Melalui upaya penelitian dari sebuah institusi program ini dijalankan.
5. Proyek Kemanusiaan adalah suatu program dari merdeka belajar kampus merdeka yang ditujukan untuk mahasiswa agar terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Kegiatan ini bisa dilakukan seperti terjun membantu pada lokasi bencana atau membuat suatu Kerjasama dengan Lembaga/organisasi kemanusiaan dalam meningkatkan kehidupan sosial kemanusiaan didesa tertinggal
6. Pendidikan dalam bentuk Proyek KKN/Desa (php2d, KKN-T) memungkinkan siswa untuk tinggal dan bekerja di masyarakat setempat sebagai bagian dari pendidikan mereka. Program ini dapat diselesaikan dalam 6-12 bulan dan mendapatkan 20-40 kredit melalui lembaga di luar kampus. KKN dilaksanakan untuk memfasilitasi kerjasama antara Kementerian Desa, PDPT, dan Kementerian atau pemangku kepentingan lainnya.

7. Inisiatif Kampus Mandiri, "Kewirausahaan Mahasiswa" memberikan kerangka kerja bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan ide bisnis mereka sendiri melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang terstruktur. Kursus untuk usaha kewirausahaan yang diperhitungkan terhadap kredit atau nilai studi satu semester dapat dikembangkan ke dalam program ini di tingkat universitas.
8. Studi/proyek mandiri adalah model pendidikan yang memungkinkan siswa untuk mengejar minat mereka dalam menyelesaikan karya kontroversial atau inovatif di tingkat nasional atau dunia. Kurikulum yang sudah diambil siswa dapat dilengkapi dengan studi atau proyek mandiri. Topik yang tidak tercakup dalam kuliah tetapi termasuk dalam kurikulum kursus dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa di universitas atau di dalam fakultas. Tugas individu untuk sebuah proyek dapat dilakukan dalam pengaturan kolaboratif dan interdisipliner. Kontribusi dan peran siswa dalam kegiatan belajar mandiri di bawah pengawasan instruktur digunakan untuk menentukan kursus yang setara dengan pengalaman tersebut.

### **Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Surabaya**

Civitas akademika Universitas Negeri Surabaya yang merupakan salah satu pintu gerbang kewibawaan lembaga penghasil pendidik perlu memahami pembelajaran mandiri di kampus mandiri, yaitu tumbuhnya program kampus mandiri di bidang pendidikan tinggi. Empat indikator yang diperoleh dari penelitian empiris terhadap upaya Universitas Negeri Surabaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa dengan mengadopsi kebijakan "pembelajaran kampus otonom".

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang tepat adalah satu-satunya aspek yang paling penting dari implementasi kebijakan. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Marnih (2015), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, melembagakan kebijakan Belajar Mandiri - Kampus Mandiri. dengan dicetuskan Kebijakan tersebut menginginkan mahasiswa bisa terampil dan meningkatkan kualitas Pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka selanjutnya kebijakan tersebut disampaikan ke semua perguruan tinggi negeri atau swasta diseluruh Indonesia.

Pada Proses Transmisi (Penyaluran Informasi) Menunjukkan bahwa Proses Komunikasi yang dilakukan Oleh Pihak Universitas Perihal Program MBKM Berjalan dengan baik. Dimana informasi perihal program MBKM diterima oleh Fakultas, Prodi dan Mahasiswa. Hal ini

berdasarkan wawancara kepada Dr Nurkholis sebagai ketua divisi KKN MBKM Mengatakan bahwa

“Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Pihak Universitas Negeri Surabaya yaitu sosialisasi kepada mahasiswa lewat program studi/ jurusan mahasiswa dan juga lewat media sosial seperti Instagram , telegram dan sebagainya. hal yang disosialisasikan adalah berbagai program yang ada di MBKM” (Wawancara,30 Maret 2022)



**Gambar 1 : Sosialisasi Program MBKM Via Youtube**  
**Sumber : Youtube Unesa official,2022**

Komitmen Universitas Negeri Surabaya terhadap kebijakan merdeka belajar kampus merdeka sudah dilakukan dengan melakukan berbagai program seperti : Fakultas Teknik sudah mengirim mahasiswa ke jepang untuk mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa (Permata) yang diwadahi oleh belmawa, Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam terapkan outcome based learning , Fakultas Ekonomi dan bisnis mengidentifikasi mata kuliah untuk kegiatan Outclass (magang,proyek kewirausahaan),Berdasarkan wawancara Kepada Dr. Trisakti, M.Sn selaku Dekan Fakultas Bahasa dan seni mengatakan bahwa

“Fakultas Bahasa dan Seni memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam menentukan metode pembelajaran secara mandiri lalu mahasiswa dapat melakukan kegiatan lintas disiplin untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai minat dan bakat mahasiswa”, fakultas ilmu Pendidikan telah melakukan persiapan matang untuk implementasian kebijakan merdeka belajar kampus merdeka seperti melakukan pertukaran mahasiswa ke berbagai daerah diseluruh Indonesia”(Wawancara 14 April 2022)

Kemudian adalah indikator kejelasan. Jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan sesuai dengan tujuan maka harus terdapat upaya dalam penyampaian informasi agar jelas dan mudah dipahami. Bentuk Upaya komunikasi kejelasan yang dilakukan oleh pihak Universitas yaitu memberikan terus Sosialisasi dan pengarahan secara mendetail terhadap Program Merdeka belajar kampus merdeka kepada setiap lini di Universitas. Selain komunikasi langsung pihak Universitas juga melakukan Komunikasi secara tidak langsung melalui poster, pamflet

mengenai apa saja program dan pentingnya mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam peningkatan kualitas Pendidikan Mahasiswa.

Terakhir adalah konsistensi. Pada indikator ini dikatakan bahwa jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan dengan efektif maka perintah pelaksana harus konsisten atau tetap. dalam merealisasikan kebijakan seringkali mengalami perubahan berdasarkan kondisi dilapangan. Apalagi dalam Pengimplentasian Kebijakan MBKM di Universitas di kurun waktu 2020-2022 banyak sekali perubahan yang awal pra pandemi ke pandemi selanjutnya dari pandemic ke Pasca Pandemi. Perubahan tersebut membawa dampak pada implementasi Kebijakan Program MBKM yang dimana pada saat pandemi mahasiswa yang mengikuti program MBKM Sangatlah terbatas karena ruang gerak yang saat itu memang dianjurkan untuk tetap disekitar daerah tempat tinggal oleh pemerintah, kemudian pada sekarang pasca pandemi Mahasiwa diberikan ruang gerak bebas dalam mengikuti Program MBKM.

Temuan studi menunjukkan bahwa pendekatan Universitas Negeri Surabaya dalam menyebarluaskan pengetahuan berpotensi menumbuhkan komunikasi dua arah, memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan mencapai semua target kebijakan dan tidak menimbulkan kebingungan; namun, lembaga dapat lebih menekankan pada menjaga konsistensi internal untuk memudahkan siswa untuk berpartisipasi dalam program MBKM.

## 2. Sumber Daya

Sesuatu Kebijakan diperlukan sumber daya untuk mendukung Proses Pelaksanaan Kebijakan Baik dari Sumber daya Manusia, Keuangan maupun Pendukung yang lain. Dalam melaksanakan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Universitas Negeri Surabaya. Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan , maka diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan mengakselerasikan antara tataran teoritis dengan praktis. Pada umumnya Sumber daya Manusia yang nantinya sebagai pengawal Program Kebijakan MBKM adalah dosen atau tenaga pendidik yang berada dalam lingkup Universitas Negeri Surabaya. hal tersebut sebagai bagian dari kekuatan sumber daya manusia dan peluang yang dimanfaatkan Universitas Negeri Surabaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen pengampu maupun dosen pembimbing Program MBKM di Universitas Negeri Surabaya.

Universitas Negeri Surabaya, terus menggenjot program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Mengingat ketidakpastian seputar dampak pandemi, Rahaju et al. (2021) berpendapat bahwa organisasi publik harus menggabungkan berbagai pemangku kepentingan

agar lebih efektif mencapai kepentingan publik. kerjasama dengan berbagai kalangan. Pada Senin, 7 Maret 2022, UNESA menandatangani nota kerjasama dengan sebelas universitas lain dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kemitraan Universitas Negeri Surabaya dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia mendorong kerjasama antara institusi dan industri untuk meningkatkan standar pemikiran dan praktik sumber daya manusia di Indonesia. Dengan kemitraan ini, ia bermaksud untuk membina generasi baru pemikir kreatif dan pemecah masalah.



**Gambar 2 : Kerja sama Unesa dan ICMI**

**Sumber : dokumentasi Satgas MBKM UNESA**

Upaya yang dilakukan meningkatkan kualitas implementasi MBKM di Universitas Negeri Surabaya yaitu memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga atau mitra dalam dan luar negeri. salah satu Kerjasamanya adalah dengan Universitas Borneo Tarakan (UBT) Kerja sama antara UNESA dan UBT bisa menjadi ruang kolaborasi dalam melahirkan banyak inovasi utamanya dalam implementasi MBKM. Hal ini berdasarkan Dr.M.Sholeh selaku Ketua Satuan Tugas MBKM Universitas Negeri Surabaya Mengatakan bahwa

“kegiatan Merdeka Belajar Kampus dapat dilaksanakan dengan seluruh stakeholder dengan penuh keberanian untuk merubah mindset. kegiatan MBKM berorientasi kontruksi sosial yang mana dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik mahasiswa maupun dosen bahkan masyarakat. minat dan semangat mahasiswa untuk mengikuti MBKM cukup tinggi dengan segala bidang yang digeluti”. (Wawancara 13 juni 2022)

Universitas Negeri Surabaya dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga kemitraan Bersama sekolah(SD , SMP , SMA) , perusahaan BUMN. BUMD dan PTN/PTS lain diseluruh Indonesia.

Sumber daya finansial. Dana yang digunakan dalam Program MBKM Berasal Satuan Biaya Operasional Rencana bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Negeri Surabaya. Sumber keuangan dalam pelaksanaan Kebijakan MBKM Selain dari RBA yaitu mendapat kucuran dana dari pemerintah lewat Kemendikbud untuk

memperlancar program MBKM di Universitas Negeri Surabaya. Dari segi mahasiswa terkait program MBKM memiliki argumen maupun persepsi terutama perihal dana, yang diketahui dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan. Narasumber Mahasiswa dari Prodi Geografi Fakultas ilmu sosial dan hukum mengatakan bahwa

“Surat tugas yang terlambat hanyalah salah satu contoh rintangan administratif yang harus diatasi siswa, tetapi sekolah cukup akomodatif dalam hal menyediakan sumber dayanya untuk penjangkauan. Bagian terburuknya, bagaimanapun, adalah bahwa tunjangan diberikan sangat lambat. Tidak semua tunjangan saya sampai saat ini telah dihabiskan. Secara khusus, saya harus menggunakan uang saya sendiri, kadang-kadang dengan meminta bantuan orang tua saya, ketika saya mengikuti program pengajaran kampus di mana salah satu proker kami membutuhkan dana tambahan. Selain itu, program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan soft skill yang tidak dipelajari di kelas dan langsung terjun untuk berhubungan dengan masyarakat sehingga dapat melihat kebenaran peristiwa yang terjadi di masyarakat dan lembaga sosial. Kesulitan dan kendala yang dihadapi selama program diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk iterasi selanjutnya.”(wawancara 10 maret 2022)

Dari 8 narasumber 6 diantaranya setuju dengan pernyataan narasumber mahasiswa 1. Sedangkan 2 sisa narasumber menjawab tidak tau menjawab apa. Dari hasil pengamatan peneliti juga terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa masih merasa mendapat berbagai kendala dan hambatan yang sama saat mengikuti program kebijakan MBKM.

Sumber daya pendukung, dalam hal ini terkait sarana prasarana dalam mendukung Pelaksanaan kebijakan MBKM di Universitas Negeri dalam bentuk Laboratorium Merdeka Belajar. Jangan membayangkan ruangan putih dibatasi empat dinding, karena laboratorium milik Unesa ini sangat berbeda. Unesa melakukan inovasi dengan membuat laboratorium terbuka menyatu dengan alam sebagai wujud penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi yang selaras dengan lingkungan. Untuk mengoptimalkan konsep rekreasi, edukasi, konservasi pada laboratorium tersebut dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Pengembangan Laboratorium Merdeka ini kedepannya untuk mendukung riset yang dilakukan oleh civitas akademika internal maupun eksternal Unesa guna mengembangkan keilmuan yang dimiliki.



**Gambar 3: Sudut Laboratorium Merdeka Belajar**

**Sumber : Dokumentasi Peneliti**

Pada saat penelitian, peneliti wawancara seorang mahasiswa yang berasal dari jurusan Bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Mengatakan bahwa:

“Laboratorium Merdeka Belajar yang berada di kampus Universitas Negeri Surabaya serasa asri banyak pepohonan maupun binatang yang ada didalamnya dan ada layanan internet yang disediakan sehingga Sangat memudahkan kami dalam hal berdiskusi dan merancang suatu kegiatan yang kami ikuti pada program MBKM”. (wawancara, 16 April 2022)

Kualitas pendidikan mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya sebagian besar tergantung pada kelanjutan implementasi Kebijakan MBKM, yang sejauh ini telah berhasil berkat pendanaan yang cukup. Berdasarkan temuan tersebut, jelas bahwa Universitas Negeri Surabaya memiliki aset manusia, kemitraan, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses MBKM pada Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; namun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal alokasi keuangan. kantong peserta program MBKM.

### 3. Dispositionisi

Pada variabel ini dapat menjelaskan bahwasanya karakter yang dimiliki oleh implementator meliputi komitmen yang kuat dan kejujuran yang dimana dapat berpengaruh besar dalam proses pengimplemtasian Kebijakan. Jika implementator memiliki sikap yang baik maka kebijakan dapat di implementasikan sesuai tujuan. Dan sebaliknya, jika implementator memiliki sikap yang buruk dan berlawanan dengan aturan atau kebijakan maka dapat itu akan berpengaruh pada keberhasilan sebuah kebijakan Satgas MBKM, stakeholder/kemitraan (kementerian dan sekolah binaan), dan mahasiswa sendiri merupakan pelaksana studi mandiri Universitas Negeri Surabaya di kampus tersendiri.

Kampus Mandiri Kebijakan Pembelajaran Independen Universitas Negeri Surabaya berpusat pada mahasiswa dan digerakkan oleh mahasiswa, dengan kebebasan dan kemampuan beradaptasi untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Setiap mahasiswa memiliki

pilihan untuk mengejar hingga tiga semester kursus di luar jurusan mereka. Selama masing-masing dari tiga semester, Anda akan memiliki tiga kesempatan untuk menarik perhatian seseorang, masing-masing berlangsung selama satu tahun akademik. menghadiri kelas di luar jurusan Anda dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler selama total dua semester.

Magang dan pengalaman kerja dalam bisnis dan organisasi lain, kerja sukarela di daerah pedesaan, program pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, dan studi akademik semuanya termasuk dalam kategori kegiatan ekstrakurikuler yang dapat digunakan untuk melengkapi pendidikan formal. mandiri dan terlibat aktif dalam inisiatif kemanusiaan. Instruktur akan memandu kelas melalui proses implementasi. Diharapkan bahwa penerapan MBKM oleh Universitas Negeri Surabaya akan memberikan para mahasiswanya pengalaman langsung yang mereka butuhkan untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan pekerjaan baru setelah lulus.



**Gambar 4: Pelaksanaan Program MBKM Unesa**

**Sumber : Dokumentasi Peneliti disekolah Tempat MBKM**

Kebijakan terpisah Pendidikan mandiri di kampus Di kampus, antar mahasiswa, dan fakultas Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab atas koordinasi dan manajemen tingkat institusi. Selain itu, Dekan/Direktur bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan di tingkat fakultas/mahasiswa pascasarjana. Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik. Sementara itu, lembaga otonom memiliki kebijakan sendiri tentang pembelajaran mandiri. Untuk penggunaan di luar tembok Universitas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola banyak kampus mandiri belajar mandiri dengan mitra masing-masing. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama harus menyetujui semua kerjasama eksternal.

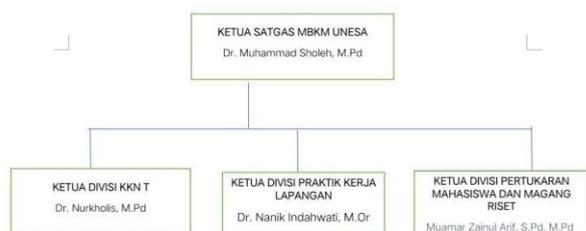
Sikap atau tingkah langkuh saat pelaksanaan Implementasi Kebijakan sangatlah penting karena dengan adanya sikap yang baik dari penyelenggara Kebijakan sampai penerima maka bisa dibilang Implementasi kebijakan bisa berjalan dengan Baik. Universitas Negeri Surabaya dapat menerapkan Kebijakan Belajar Mandiri secara efektif berkat pemberian kebebasan akademik universitas bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan dorongannya kepada mahasiswa untuk

terlibat dalam kegiatan belajar di luar lembaga pendidikan tradisional, seperti magang bersertifikat dan kampus. pengajaran.

#### 4. Struktur birokrasi

Pada variabel struktur birokrasi ini memiliki daya pengaruh yang signifikan dalam proses pengimplemtasian kebijakan. Standar operational prodesural (SOP) merupakan bagi pedoman bagi implementator dalam menjalankan kebijakan agar sesuai. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Alhamda dan Megawati (2021), yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus mengatur kebijakannya sendiri dari bawah ke atas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sesuai dengan peran dan fungsinya. tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pihak untuk menjamin keberhasilan program. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana di Perguruan Tinggi Negeri; dan Permendikbud Nomor 7 tentang Pemingkatan Perguruan Tinggi semuanya sejalan dengan pelaksanaan Permendikbud Nomor 3.

Tugas dan Fungsi Universitas Negeri Surabaya dalam pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sangat berkomitmen dalam pelaksanaan Kebijakan MBKM ini, Maka dari pihak Rektorat Universitas Negeri Surabaya Membuat Satuan Tugas MBKM Universitas Negeri Surabaya yang dibentuk Pada Tahun 2020 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dari kementerian ke Universitas dan dari Universitas ke fakultas dan mahasiswa, mensosialisasikan berbagai program yang dilaksanakan pada Merdeka belajar Kampus Merdeka, mengawasi pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diikuti oleh para mahasiswa Universitas Negeri Surabaya,selanjutnya melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal dan relevan.



**Gambar 5 : Struktur Satgas MBKM UNESA**

**Sumber : SATGAS MBKM UNESA**

Penetapan Program Studi Mandiri dan alih program akan diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021, untuk itu disusun dan diajukan. Menurut peraturan rektor, kampus mandiri UNESA 5-1-2 dan 6-0-2 adalah tempat diberlakukannya kebijakan kemandirian mahasiswa di dalam kelas. Pola 5-1-2 digambarkan sebagai pola belajar mahasiswa untuk kegiatan selama 5 semester program studi, 1 semester di luar program studi di Unesa, dan 2 semester di luar Unesa dalam Pasal 1 huruf an Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya mengizinkan mahasiswa untuk menghabiskan 2 semester di luar Unesa, oleh karena itu struktur 5-1-2 layak bagi mereka yang ingin memanfaatkan salah satu program pembelajaran mandiri di kampus pengajaran atau magang yang diakui.

Tanggung Jawab dan Peran Kelembagaan dalam Implementasi Kebijakan MBKM Mata kuliah di tingkat fakultas yang bersifat transferable antar jurusan harus disusun dan mudah diakses oleh mahasiswa. Semua Program Studi kini memiliki daftar program studi tingkat fakultas yang tersedia bagi mahasiswa. Setiap program bekerja dengan profesor dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk merancang kurikulum MBKM sendiri, dan memungkinkan siswa untuk mengambil kelas dari program lain jika mereka mau. Hingga saat ini, kuota telah terpenuhi, dan setiap prodi telah menyediakan mahasiswa pilihan dari prodi lain (20-40 mahasiswa).

Membuat perjanjian kerjasama (MoU/SPK) dengan pihak-pihak terkait. Fakultas telah menyiapkan MoU/SPK dengan sejumlah kampus negeri, terutama dengan sejumlah mitra, termasuk instansi pemerintah dan perusahaan yang dapat membantu kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Fakultas telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian terkait untuk memfasilitasi kolaborasi dengan perusahaan swasta dan entitas pemerintah.

Tantangan kebijakan MBKM dari civitas akademika antara lain: Sifat yang menantang dalam menyelaraskan mata kuliah yang akan tersedia dan yang akan diambil, Tidak mudah untuk menemukan mitra bisnis yang akan bekerja dengan Anda jika Anda mencoba untuk mematuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diuraikan dalam buku panduan MBKM, karena banyak perusahaan besar memiliki persyaratan dan proses seleksi di tempat. .

Program Studi bertanggung jawab untuk merancang atau merevisi kurikulum agar sesuai dengan model implementasi kampus merdeka, yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan MBKM. Kurikulum MBKM telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi bekerja sama dengan fakultas dari FIP, FBS, dan FMIPA serta dengan masukan dari mahasiswa dan dewan penasihat lembaga

tersebut. Setiap jurusan diperbolehkan untuk menyusun kurikulumnya sendiri, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya, mudah dikelola, dan kaya akan kesempatan belajar ekstra kurikuler bagi siswanya. Kursus telah dimodifikasi agar lebih selaras dengan CPL (Hasil Belajar Pascasarjana) siswa, dan siswa yang telah mengambil kursus dari beberapa program memiliki kredit tersebut diterapkan ke pilihan atau diganti dengan yang lebih sesuai dengan CPL mereka. Membantu mahasiswa yang ingin menempuh mata kuliah interdisipliner.

Beberapa kali koordinator program studi dan dosen menawarkan sosialisasi, baik secara langsung maupun pada saat mengajar, untuk mendorong mahasiswa mengikuti program studi silang di tingkat universitas. Untuk membantu mahasiswa memaksimalkan CPL mereka, dosen pembimbing menginstruksikan mereka tentang nilai mengejar peluang studi silang. Koorprodi merevisi dan menyusun kurikulum MBKM berbasis kompetensi yang dapat diadaptasi. Fakultas juga telah membuat SOP untuk program kegiatan MBKM, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mempelajari langkah-langkah yang perlu diambil sebelum bergabung pada salah satu kegiatan yang tersedia. Selain itu, sistem telah disiapkan untuk mendukung operasi ini.

Memberikan mahasiswa pilihan untuk mengambil kursus di luar jurusan mereka dan Universitas untuk memenuhi persyaratan. Beberapa prodi menyiapkan mata kuliah yang tidak diajarkan di kampus lain, sehingga menarik minat mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tersebut dengan kuota 20-40 mahasiswa. Kursus-kursus ini telah disediakan oleh Fakultas Internasional dan Hubungan Masyarakat (FIP), Fakultas Bisnis dan Ekonomi (FBS), dan lainnya melalui program studi masing-masing.

Menyelesaikan proses menyamakan kursus dengan pengalaman belajar yang berlangsung di luar kurikulum akademik formal dan lingkungan universitas. Fakultas menjalankan perannya dalam mendukung program "MBKM" sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masing-masing pejabat yang berwenang, yang antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada, menyelenggarakan penyetaraan mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar institusi. Bahkan jika seorang siswa mengambil kursus yang tidak terdaftar di program studi, mereka mungkin menganggapnya sebagai pilihan jika itu membantu mereka menjadi lebih mahir di bidang yang mereka pilih.

Rencana studi memiliki batasan-batasan tertentu Salah satu tantangan utama dalam konversi mata kuliah adalah bahwa, selain jam kredit, mata kuliah yang perlu diubah umumnya adalah mata kuliah yang baru saja diselesaikan mahasiswa. Infrastruktur yang diperlukan untuk menggelar MBKM belum lengkap. Ketiga, belum ada

definisi program MBKM yang diterima secara universal, sehingga implementasinya rumit. Ketidaktertarikan siswa adalah faktor keempat. Tidak mungkin untuk menyeimbangkan ekstrakurikuler dengan waktu kelas karena ketidakcocokan. Keenam, kompleksitas implementasi bertambah dengan banyaknya program dan kegiatan yang berbarengan. Ketujuh, ada masalah dengan jaringan.

Pada Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus merdeka Universitas Negeri Surabaya terus memonitoring dan mengawasi pada setiap lini universitas seperti dipihak Universitas sampai lingkup Program Studi. Setelah ada nya pengawasan dari sistem birokrasi maka pihak Universitas Negeri Surabaya menemukan berbagai kendala-kendala yang perlu dibenahi sesegera mungkin agar Universitas Negeri Surabaya mampu implementasikan kebijakan MBKM dengan baik dan tentunya bisa sebagai faktor peningkatan kualitas Pendidikan Mahasiswa. Terbukti, Universitas Negeri Surabaya berkomitmen untuk memberikan dukungan yang kuat untuk Kebijakan Belajar Mandiri kampus Merdeka dalam upaya meningkatkan standar pendidikan yang ditawarkan di sana. Untuk lebih membekali mereka dalam menghadapi tuntutan zaman yang memasuki revolusi industri 5.0.

Kementerian Pendidikan telah menetapkan MBKM sebagai salah satu tujuan peningkatan kompetensi mahasiswa pascasarjana, baik soft skill maupun hard skill. lulusan yang unggul dan sopan bisa terus memerintah negara. Dalam hal peningkatan kualitas pendidikan yang ditawarkan kepada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, salah satu indikator yang berperan penting adalah struktur birokrasi MBKM. Pada indikator ini dapat dikatakan bahwa Struktur birokrasi yang ada pada Universitas Negeri Surabaya masih perlu adanya perbaikan sistem yang lebih rapi dan tersusun karena masih terlihat kendala-kendala seperti tidak adanya penyesuaian waktu perkuliahan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kebijakan Pendidikan dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa mengalami beberapa kali perubahan dinamika dan kendala kebijakan pendidikan pada periode Oktober 2021 sampai Mei 2022 Sebagai berikut :

Pertama, Komunikasi proses penyampaian informasi yang telah dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya dapat menciptakan adanya komunikasi dua arah Sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh

sasaran kebijakan tetapi dalam konsistensi komunikasi pihak Universitas harus lebih menekankan agar memudahkan mahasiswa dalam menjalani program MBKM apalagi mahasiswa dan civitas akademika yang mengalami perubahan kondisi dari sebelum pandemi, pandemi dan pasca pandemi

Kedua, sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Negeri Surabaya dalam pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dikatakan baik dari segi manusia, Kemitraan, maupun sarana prasarana dalam mendukung proses MBKM. Tetapi perlu diperhatikan disegi keuangan perlu adanya peningkatan lagi apalagi dalam hal pendistribusian uang saku terhadap mahasiswa yang mengikuti program MBKM sering kali terlambat yang itu menyulitkan mahasiswa

Ketiga, Universitas Negeri Surabaya sebagai penyelenggara Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mampu menjalankan kebijakan dengan baik hal ini didukung dengan Pihak Universitas Memberikan Kebebasan Bagi Mahasiswa Untuk mengikuti kegiatan diluar Prodi dan memberikan kebebasan melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi seperti magang bersertifikat dan kampus mengajar.

Keempat, Universitas Negeri Surabaya dalam hal Struktur birokrasi terus melaksanakan tugas dalam memonitoring dan mengawasi sistem birokrasi. Menemukan kendala-kendala seperti tidak adanya kesesuaian waktu perkuliahan dengan program MBKM yang diluar prodi hal-hal tersebut yang perlu dibenahi sesegera mungkin.

## SARAN

Peneliti di Universitas Negeri Surabaya dapat memberikan rekomendasi berikut berdasarkan temuan mereka mengenai penerapan Kebijakan Belajar Mandiri di kampus tersendiri dalam upaya meningkatkan standar pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa di sana.

1. Pada indikator Komunikasi Pihak Rektorat dan Lembaga pengembangan pembelajaran penjaminan mutu Universitas Negeri Surabaya terutama Satuan Tugas Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan lebih meningkatkan Konsistensi Komunikasi terhadap mahasiswa yang mengikuti program MBKM Karena pada kurun waktu 2020-2022 Kondisi kerap berubah dari sebelum pandemi, pandemi dan pasca pandemi.
2. Pada indikator Sumber daya Universitas Negeri Surabaya terutama pada keuangan seharusnya pendistribusian uang saku pada mahasiswa yang mengikuti program MBKM jangan sampai terlambat karena dengan uang saku tersebut berguna bagi

mahasiswa dalam menunjang proker dikegiatan MBKM

3. Dalam indikator Struktur Birokrasi di Universitas Negeri Surabaya dengan Memperbaiki manajemen atau SOP dalam menjalankan kebijakan Merdeka Belajar kampus merdeka agar kedepannya mahasiswa yang mengikuti program MBKM bisa lancar tanpa ada hambatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan, W., Saidatul, I., & Kholida, F. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar. *METODIK DIDAKTIK Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 16(2), 102–107. <https://doi.org/10.17509/md.v16i2.30125>
- Alhanda, F., N. F., Megawati, S. (2021) Analisis Implementasi Program Adiwiyata dalam membangun karakter peduli lingkungan di SMA Negeri 3 Jombang, *Publika* 9(3):335-344. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40227/34992>
- Andi Ilham Makhmud, D. (2021). *Panduan Operasional Buku (POB) Pertukaran Mahasiswa Merdeka*. 32. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/asset/s/pertukaranMahasiswaMerdeka/assets/POB-Pertukaran-Mahasiswa-Merdeka.pdf>
- Angkasa, G. D., Prabawati, I. (2018) Implementasi Program keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan didesa Kedungrojo Kecamatan Plumpang kabupaten Tuban. *Publika*. 6(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/22377/20514>
- Anwar, R. N. (2021). Pelaksanaan Kampus Mengajar Angkatan 1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(1), 210–219. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.221>
- Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal Of Public Sector Innovations)*, 1 (1), 37-46. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2243>
- Fish unesa. (2020, 16 Desember). Buku Pedoman MBKM UNESA 2020, di peroleh 16 mei 2022. Dari [https://www.google.com/search?q=fish+unesa+buku+pedoman+mbkm&ei=GIxY-37OaWK8QPY\\_qTwDg&ved=0ahUKEwj6cClhbL6AhUIRXwKHVg\\_Ce4Q4dUDCA0&uact=5&og=fish+unesa+buku+pedoman+mbkm&gs\\_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQvgRYjiIgzDFoBnAAeACAAXWIAZ0FkgEDMy40mAEAoAEBwAEB&scient=gws-wiz](https://www.google.com/search?q=fish+unesa+buku+pedoman+mbkm&ei=GIxY-37OaWK8QPY_qTwDg&ved=0ahUKEwj6cClhbL6AhUIRXwKHVg_Ce4Q4dUDCA0&uact=5&og=fish+unesa+buku+pedoman+mbkm&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFKBAhGGABQvgRYjiIgzDFoBnAAeACAAXWIAZ0FkgEDMy40mAEAoAEBwAEB&scient=gws-wiz)
- Indonesia, U. P. (2020). Panduan MBKM UPI. [https://cs.upi.edu/v2/assets/docs/Panduan\\_MBKM\\_UPI.pdf](https://cs.upi.edu/v2/assets/docs/Panduan_MBKM_UPI.pdf)
- Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. (2020) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik No 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan

- tinggi. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan : jakarta
- Khotimah, N. R., Riswanto, & Udayati. (2021). Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Di Sd Negeri 014 Palembang Sumatera Selatan. *Sinar Sang Surya ( Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat)*,5(2), 194–204. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/article/view/1700/1113>.
- Kurniasari, E., & Rahayu, T. (2022). Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. 10 Nomor 3. *Publika*, 981-994. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47476/39707>
- Lutfi, I. Mardianai, R (2020). Merdeka Belajar Kampus Merdeka *Policy: How Does It Affect the Sustainability on Accounting Education in Indonesia?* *Jurnal dinamika pendidikan*. 15(2):243-253. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/DP/article/view/26071/11209>.
- Malkab, M., Nawawi, J., Mahmud, A., & Sujiono, E. H. (2015). The Implementer Disposition of Teacher Certification Policy in Indonesia. *International Education Studies*, 8(5), 54-61. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1060802>
- Pahlawan A.Y., Priyansyah R., Mashuri M.A. (2020) Penerapan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dalam pembentukan mahasiswa berkarakter multicultural (studi UPNJVT), *Journal of research*, 2(3).326-335. <http://paj.upnjatim.ac.id/index.php/paj/article/view/60/54>
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip Upn Veteran Jawa Timur. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 276–292. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2539>
- Prabawati, I., Rahaju, T., Oktariyanda, T., Megawati, S., (2021). Pengaruh implementasi daring terhadap Optimalisasi Capaian belajar mahasiswa dalam pandemi covid 19? *Jurnal UNIPA Surabaya*,. 73 (1). <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/3933/2960>
- Setiawan, F., & Sukamto, S. (2021). Implementasi Kampus Mengajar Perintis (KMP) sebagai Cikal Bakal Penggerak Pembelajaran Literasi dan Numerasi di Sekolah Dasar. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(2), 339–345. <https://doi.org/10.33578/jpkip.v10i2.8251>.
- Sulistiyani, E., Khamida, K., Soleha, U., Amalia, R., Hartatik, S., Putra, R. S., Budiarti, R. P., & Andini, A. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Fakultas Kesehatan dan Non Kesehatan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1),686–698. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1943>
- Surabaya,U.N. (2020). Panduan Kurikulum MBKM UNESA. <https://www.unesa.ac.id/files/b6502b70dad0b86b8a3a7589a7d7b7ce/Academic%20Guideline%20-%20MBKM%20Curriculum%202020.pdf>
- Sulila, I. (2021). The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small and Medium-Sized Enterprises Empowerment Policy Implementation In Indonesia. *The Journal Of Asian Finance, Economics, and Business*, 8 (6), 1213-1223. <https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202115563460873.page>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Tohir, M. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>.
- Universitas Negeri Surabaya. (2021). Peraturan rektor No.3 Tahun 2021 tentang penerapan program merdeka belajar serta pengakuan dan konversi mata kuliah pada Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya : Surabaya
- Universitas Negeri Surabaya. (2021). Peraturan rektor No.9 Tahun 2020 tentang Peraturan akademik pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka. Universitas Negeri Surabaya : Surabaya